BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian dan berfungsi untuk menambah teori yang digunakan dalam mempelajari penelitian yang dilaksanakan. Dari penelitian terdahulu yang berhasil penulis himpun, tidak menemukan judul penelitian yang sama persis. Namun demikian, penulis mengajukan beberapa penelitian sebagai bahan referensi untuk penelitian penulis. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat dan menjadikan 5 (lima) penelitian terdahulu sebagai referensi dan pedoman dalam penulisan penelitian ini.

1. Penelitian yang pertama yaitu penelitian oleh Distantiya Putri Islami, Emmy Budiartati, yang berjudul "Implementasi Bina Keluarga Remaja di Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang"(2021). dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan dalam penelitiannya adalah Bagaimana Implementasi Bina Keluarga Remaja di Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Hasil dari penelitiannya adalah Kelurahan Pleburan, Kecamatan Sema-rang Selatan, Kota Semarang. Jumlah penduduk Kelurahan Pleburan sebesar 4779 jiwa sesuai dengan data kependudukan Kelurahan Pleburan per September 2019 dengan jumlah KK sebanyak 2.275 dan remaja sebanyak 613 jiwa.

Jumlah pen-duduk yang besar akan menimbulkan permasa-lahan yang besar pula, terutama permasalahan yang terjadi pada golongan remaja. Kelurahan Pleburan memiliki jumlah remaja yang cukup tinggi, dikhawatirkan akan terjadi penyimpan-gan sosial atau permasalahan dikalangan rema-ja. Maka untuk meminimalisir penyimpangan sosial pada remaja diperlukan program yang da-pat memberikan informasi kepada orang tua re-maja terkait dengan permasalahan remaja, yaitu program Bina Keluarga Remaja. Setiap program pasti memiliki faktor pendukung penghambat . Faktor pendukung dari program BKR ini adalah kader yang aktif, sasaran yang aktif, dan adanya dukungan dari pemerintah kelurahan. Sedangkan faktor peng-hambatnya adalah tidak adanya pendaan dari pemerintah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan terbatasnya sumber daya manu-sia.

2. Penelitian yang kedua yaitu penelitian oleh Putri Novariani yang berjudul "Peran Kelompok Bina Keluarga Remaja dalam Membina Remaja di Kampung KB Bahari Kelurahan Lappa" dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan dalam penelitiannya adalah Peran Kelompok Bina Keluarga Remaja dalam Membina Remaja di Kampung KB Bahari Kelurahan Lappa. Hasil dari penelitiannya adalah Peran Kelompok Bina Keluarga Remaja dalam Membina Remaja di Kampung KB Bahari Kelurahan Lappa yaitu bahwaperan Kelompok BKR dalam membina remaja dilakukan melalui 3(Tiga) tahapan peran yaitu penyuluhan, pembinaan,

danbimbingan kepada orangtua remaja yang kemudian dilanjutkan kepada remaja.1) Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kelompok Bina Keluarga Remaja masih kurang efektif dikarenakan pelaksaan kegiatan penyuluhan tidak dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan pedoman, begitupun dengan jumlah sasaran yang masih kurang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok BKR. 2) kegiatan pembinaan yang dilaksanakan berfokus pada bidang keagamaan dengan menyelenggarakan tiga kegiatan keagamaan setiap minggunya yaitu pengajian, tarbiah, dan tahsin. 3)Khusus pada kegiatan bimbingan dalam hal ini pelayanan konseling dilakukan dengan cara kunjungan rumah tidak terealisasikan dikarenakan Kelompok BKR tidak memiliki keahlian dibidang tersebut, juga para orang tua remaja yang ingin diberi bimbingan menggap bahwa Kelompok BKR terlalu ikut campur dalam masalahnya.

3. Penelitian yang ketiga adalah penelitian oleh Fenicia Desiana Saragih, yang berjudul "Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung" (2018) dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan dalam penelitiannya adalah Bagaimana Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Hasil penelitiannya adalah Peran Bina Keluarga Remaja dalam mewujudkan

keharmonisan keluarga di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung adalah sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator melalui penyuluhan yang dilakukan oleh kader BKR dan PLKB kepada anggota BKR agar menambah pengetahuan serta terwujdunya keharmonisan keluarga.Faktor penghambat dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja adalah masih kurangnya kesadaran pasangan usia untuk ikut berpartisipasi dan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Bina Keluarga Remaja. Faktor pendukungnya adalah Adanya semangat dan kerjasama yang baik dari setiap kader, kemudian di dukung oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mendampingi dan membantu kader dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja.

4. Penelitian yang keempat adalah penelitian oleh Retno Dewi Anggraeni , Ani Margawati, Nurjazuli, yang berjudul "Pola Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Provinsi Jawa Timur" (2016) dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan dalam penelitiannya adalah Bagaimana Pola Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitiannya adalah Dari beberapa temuan di lapangan serta dari konsep diatas dapat kami simpulkan bahwa BKR Kartini merupakan Kelompok BKR terbaik di Jombang, sedangkan BKR Merpati masih dalam proses. Apabila dilihat dari pelaporan di Kabupaten Jombang lengkap sesuai juklak dari Propinsi untuk kabupaten Madiun ada tapi belum lengkap. Ditinjau dari sisi

pengembangan kemitraan hasil inovasi kelompok masih belum kelihatan, sedang pertemuan rutin kader sudah berjalan setiap bulan dan penyuluhan materi BKR oleh kader terhadap kelompok pengajian berjalan rutin, juga ada kegiatan inovasi kerah kegiatan ekonomi produktif, jumlah anggota inti Kelompok BKR masih rendah, koordinasi di tingkat kecamatan sudah berjalan baik, sudah memiliki BKR percontohan, namun belum sesuai dengan kriteria BKR percontohan, dana operasional untuk kegiatan pertemuan masih kurang dan yang perlu diperhatikan bahwa Pokjanal di tingkat kabupaten masih belum terbentuk terutama di Kota Madiun.

5. Penelitian yang kelima adalah penelitian oleh Shinta Nantya Mulyaningsih yang berjudul "Pembinaan Remaja pada Bina Keluarga Remaja di Desa Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali"(2017) dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan dalam penelitiannya adalah Bagaimana Pembinaan Remaja pada Bina Keluarga Remaja di Desa Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali . Hasil Penelitiannya adalah Prosedur pembinaan remaja yang dilakukan adalah yang pertama mengumpulkan informasi, dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan remaja. Kedua mengidentifikasi masalah, hal ini dilakukan dengan mendiskusikan bersama kader BKR dan kalau diperlukan bersama anggota. Ketiga menganalisis masalah, setelah mengidentifikasi masalah analisis dilakukan bersama dengan kader dan anggota. Keempat mencari dan menetapkan alternatif pemecahan

masalah, pada tahap ini pihak BKR tidak terlibat secara langsung dan dikembalikan kepada pihak keluarga yang bermasalah. Dan kelima melaksanakan upaya pemecahan masalah, pada tahap ini akan dikembalikan sepenuhnya kepada pihak keluarga.

Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu

No.	**Peneliti**	**Judul (Tahun)**	**Teori**	**Temuan**
1	Distantiya Putri Islami, Emmy Budiartati,	"Implementasi Bina Keluarga Remaja di Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang" (2021).	Teori yang digunakan yaitu Pelaksanaan Program dengan fokus peneitian yaitu 1. Tahap interpretasi 2. Tahap pengorganisasian 3. Tahap aplikasi 4. Pengawsan dan evaluasi	1. kelompok BKR Tunas Harapan yang meru-pakan BKR di Kelurahan Pleburan dengan tuju-an untuk menambah wawasan dan keterampilan orang tua remaja yang ada di Kelurahan Pleburan untuk membina dan mendidik anak remajanya. 2. Kader memiliki tugas sebagai perenca-na suatu kegiatan, kemudian mensosialisasikan, hingga melaksanakan kegiatan tersebut serta mengevaluasi kegiatan yang telah

				dilaksana-kan. Selain menetapkan pelaksana program, menetapkan prosedur yang digunakan oleh BKR Tunas Harapan juga perlu dilakukan. BKR Tunas Harapan menggunkan prosedur dari pe-merintah yang telah menetapkan peraturan da-lam pelaksanaan BKR.
2	Putri Novariani	"Peran Kelompok Bina Keluarga Remaja Dalam Membina Keluarga di Kampung KB Bahari Kelurahan Lappa"(2021)	Teori yang digunakan yaitu Pelaksanaan Program dengan fokus peneitian yaitu 1. Responsivitas 2. Ketepatan 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Ekonomi Hasil program	1. kegiatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya remaja melalui pembinaan, bimbingan, dan penyuluhan kepadaorang tua yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap remaja. 2. peran Kelompok Bina Keluarga Remaja melalui pembinaan, bimbingan dan penyuluhan.

3	Fenicia Desiana Saragih	"Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung" (2018).	Teori yang digunakan adalah pendekatan melalui pengembangaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/M), sedangkan pendekatan kepada keluarga dilakukan melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).	1. Peran Bina Keluarga Remaja dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung adalah sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator melalui penyuluhan yang dilakukan oleh kader BKR dan PLKB kepada anggota BKR agar menambah pengetahuan serta terwujdunya keharmonisan keluarga. 2. Faktor penghambat dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja adalah masih kurangnya kesadaran pasangan usia untuk ikut berpartisipasi dan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Bina Keluarga Remaja. Faktor pendukungnya adalah Adanya semangat dan

				kerjasama yang baik dari setiap kader, kemudian di dukung oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mendampingi dan membantu kader dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja.
4	Retno Dewi Anggraeni , Ani Margawati, Nurjazuli,	"Pola Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Provinsi Jawa Timur" (2016).	Teori yang digunakan adalah Pertumbuhan jumlah pertumbuhan remaja yaitu dengan mengukur indikator pengelolaan program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan indikator pertumbuhan kelompok BKR di Jawa Timur.	1. BKR Kartini merupakan Kelompok BKR terbaik di Jombang, sedangkan BKR Merpati masih dalam proses. Apabila dilihat dari pelaporan di Kabupaten Jombang lengkap sesuai juklak dari Provinsi untuk kabupaten Madiun ada tapi belum lengkap. juga ada kegiatan inovasi kerah kegiatan ekonomi produktif, jumlah anggota inti Kelompok BKR masih rendah, koordinasi di tingkat kecamatan sudah berjalan baik

5	Shinta Nantya Mulyaningsih	"Pembinaan Remaja pada Bina Keluarga Remaja di Desa Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali"(2017)	Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan sesuai buku prosedur.	1. Prosedur pembinaan remaja yang dilakukan adalah yang pertama mengumpulkan informasi, dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan remaja. Kedua mengidentifikasi masalah. Ketiga menganalisis masalah. Keempat mencari dan menetapkan alternatif pemecahan masalah. Dan kelima melaksanakan upaya pemecahan masalah, pada tahap ini akan dikembalikan sepenuhnya kepada pihak keluarga.
6	Maya Sofiana	"Implementasi Program Bina	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan	

		Keluarga Remaja (BKR) Sebagai Sarana Edukasi Keluarga (Studi Pada Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten probolinggo)" (2021)	dalam riset ini adalah teori implementasi program menurut (Maniah dan Hamidin 2017 : 1) yang menyatakan dalam menilai implementasi program terdapat 3 variabel diantaranya: Input, proses dan output.	

Sumber: Maya Sofiana, 2022

Demikianlah keseluruhan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis sajikan yang digunakan sebagai perbandingan. Dari tabel di atas, diketahui bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dari penelitian terdahulu diatas yang telah dilakukan sebelumnya. Dari penelitian ini, penulis mencoba melakukan penelitian mengenai program bina keluarga remaja sebagai sarana edukasi keluarga di Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

A. Kerangka Dasar Teoritik

Pada penulisan dan penyusunan skrips ini peneliti menyusun suatu kerangka teoritik yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam menggambarkan masalah yang akan diteliti. Penggunaan teori sebagai dasar landasan agar penelitian memiliki pandangan yang lebih jelas. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian:

1. Administrasi

Aministrasi secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *ad* + *ministrare* yakn administrate, yang memiliki arti melayani atau membantu. Jadi Administrasi yaitu segala hal kegiatan yang dilakukan dalam pengaturan hingga pengurusan yang membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. (Alemina Henuk-Kacaribu. 2020). Administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

Gambar 2.1

Pembagian Arti Administrasi

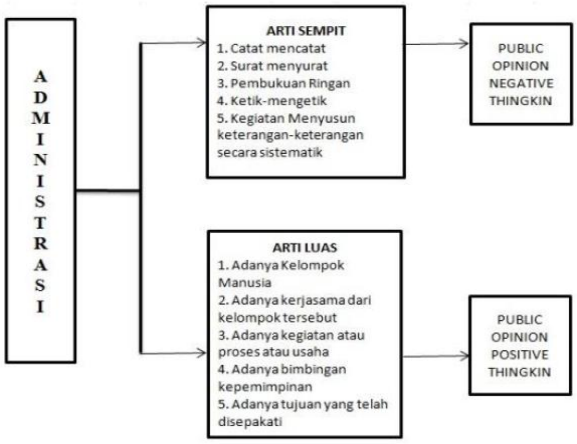

Sumber: Afifuddin, 2010: 6

1. Dalam arti sempit administrasi berasal dari bahasa Belanda yakni *Administratie* yang memiliki arti kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*) diantaranya catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan (*clerical work*) (Silalahi, 2013:5).
2. Administrasi dalam arti luas berasal dari bahasa Inggris "*Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*" dengan arti kegiatan kelompok yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Afifuddin, 2010: 3-4).

a) Ruang Lingkup Administrasi

Pasolong (2008:21) membagi delapan ruang lingkup administrasi publik yaitu, "kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja, dan etika adminintrasi publik". Ruang lingkup administrasi publik terdiri dari:

1) Organisasi publik, berprinsip pada perilaku birokratisasi dan model organisasi.
2) Manajemen publik, berkaitan dengan manajemen, produktivitas, manajemen sumber daya manusia dan dana.
3) Implementasi, berkenaan dengan pendekatan kebijakan publik dan penerapannya, administrasi pemerintah dan etika birokrasi (*Enhanced Reader*, t.t.)

b) Fungsi dan Tujuan Administrasi

Fungsi administrasi dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang utama adalah harus dijalankan oleh seorang pimpinan untuk mengarahkan dan menggerakkan segala kegiatan terhadap bawahan agar dapat menghindari adanya pemborosan biaya, waktu dan sarana perlengkapan kantor.

Menurut Quible (2011:55) ada 5 (lima) jenis fungsi pendukung administrasi yaitu:

a) fungsi rutin yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Biasanya fungsi ini dilaksanakan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi sehari-hari.

b) fungsi teknis yaitu fungsi administrasi yang membutukaan pendapat, keputusan dan keterampilan perkantoran yang memadai, seperti bisa menggunakan beberapa program aplikasi komputer. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf administrasi yang tergantung daam departemen teknologi informasi.

c) fungsi analisis yaitu fungsi yang membutukan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai kemampuan untuk mengambil keputusan, seperti membuat dan menganalisis laporan dan membuat keputusan pembelian. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh seorang manajer yang bertanggung jawab memsupport keputusan yang akan dibuat oleh atasannya.

d) Fungsi interpersonal yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, serta

keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, seperti mengorganisasikan tim proyek. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf administrasi sebagai jenjang karier sebelum naik menjadi manajer pada suatu organisasi.

e) fungsi manajerial yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian pengukuran dan pemotivasian seperti pembuatan anggaran dan pengevaluasian karyawan. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh staf setingkat manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi.

Tujuan utama dari administrasi publik adalah agar dapat mencapai tujuan negara sesuai keinginan publik. Adapun beberapa keingin publik tersebut adalah: Keamanan, Kesejahteraan, Keadilan. Untuk dapat mencapai tujuan administrasi publik tersebut, maka diperlukan beberapa hal berikut ini:

1. Partisipasi Sosial, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan administrasi publik.
2. Tanggungjawab Sosial, yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana administrasi publik kepada masyarakat.
3. Dukungan Sosial, yaitu dukungan yang diberikan oleh publik terhadap pelaksanaan administrasi publik.
4. Kontrol Sosial, yaitu kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap kegiatan administrasi publik.

c) Unsur-unsur Administrasi

Delapan unsur administrasi menurut Anggara (2012:29) yaitu :

1) Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama.
2) Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas kerja. Meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pembimbingan, pengoordinasian, pengawasan, penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja.
3) Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama.
4) Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai yang diperlukan.
5) Keuangan, yaitu pengolahan segi-segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan.
6) Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja.
7) Tata Usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman dan penyimpanan berbagai keterangan ang diperlukan.
8) Hubungan Masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerjasama.

Kedelapan unsur administrasi tersebut saling terkait sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Ini bermakna bahwa, studi administrasi akan sempurna apabila memiliki kedelapan unsur tersebut diatas.

d) Paradigma Administrasi Publik

Thoman S. Kuhn, berpendapat bahwa paradigma adalah cara menyelesaikan masalah ilmiah di lingkungan masyarakat pada masa tertentu. Administrasi mengalami 5 perkembangan dalam paradigma dan setiap paradigma memiliki ciri khusus sesuai focus dan locus sebagai berikut:

1. Paradigma I (1900 – 1926) Paradigma Dikotomi Politik Administrasi

   Paradigma ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki fungsi pokok yakni politik dan administrasi sehingga perlu dibedakan antara administrasi dan politik. Administrasi negara harus bergandengan dengan birokrasi pemerintahan. Fungsi politik adalah pencerminan tindakan negara dalam bentuk kebijkan sedangkan fungsi administrasi yakni berhubungan dengan pelaksana kebijakan. Adanya perbedaan hal ini lah, sering terjadi perdebatan dari kalangan akademisi maupun praktisi sehingga memunculkan istilah dikotomi politik administrasi.

2. Paradigma II (1927 – 1937) Prinsip-prinsip Administrasi

   Paradigma administrasi dipandang sebagai universal pada organisasi dengan menonjolkan focusnya yang pada kenyataannya administrasi berprinsip pada setiap organisasi industri maupun pemerintahan baik itu dari segi lingkungan, sosial budaya, tujuan bahkan jenis organisasi yang melaksanakan.

3. Paradigma III (1950 – 1955) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

   Pada paradigma III ini kembali menekankan hubungan administrasi negara dengan ilmu politik secara konseptual. Pada tahap

ini berkembangnya administrasi negara sudah menjadi bagian dari ilmu politik, namun karena adanya kritikan yang membuat administrasi negara kembali pada birokrasi pemerintahan yang masuk pada disiplin induknya.

4. Paradigma IV (1956 – 1970) Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi

   Munculnya paradigma ini diawali dari anggapan bahwa ilmu administrasi merupakan ilmu kedua setelah ilmu politik. Ilmu administrasi dalam paradigma ini dinyatakan sebagai teori organisasi dan ilmu manajemen dalam segala studi dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi program secara lebih tepat.

5. Paradigma V (1970 – sekarang) Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

   Pada hal ini administrasi negara mulai masuk dalam teori organisasi, ilmu kebijakan dan ekonomi politik. *Herbert Simon* menyatakan ada dua aspek yang perlu dikembangkan dalam administrasi negara, antara lain:

   1. Administrasi negara lebih memusatkan pada perkembangan ilmu murni administrasi

   2. Penentuan kebijakan publik dilakukan oleh satu kelompok besar

*Sumber:*Jurnal Administrasi Universitas Medan Area (Pasolong,2012: 36-38).

e) Hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik

Jika dilihat berdasarkan konseptual, kebijakan publik merupakan dua rumpun ilmu yang terdiri atas ilmu politik dan administrasi publik. Menurut prinsip ilmu administrasi publik, kebijakan publik merupakan aktor dinamis dari negara (organisasi) yang berasal dan dibuat oleh pemerintah (manajemen) untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan kenegaraan. Hubungan dari penjelasan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik

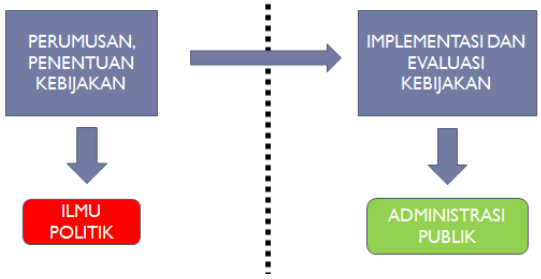

Sumber: Rahmadi, 2018 (Diolah Penulis), 2021

Dalam proses pemerintahan hubungan administrasi publik dengan kebijakan publik yaitu admnistrasi publik merupakan realisasi kebijakan yang berfokus pada penegakan hukum, pembuat dan penerapan peraturan serta regulasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik dengan tujuan menata kebijakan publik dalam memecahkan masalah publik yang terjadi baik pada instansi pemerintaha atau organisasi (Abdul Kadir, 2018).

2. Kebijakan Publik

Menurut Soetopo kebijakan publik yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah yang didalamnya mengandung manfaat pada kepentingan masyarakat yang diproyeksikan dengan tujuan, nilai praktek tertentu dan tidak menimbulkan kerugian pada para pelaksana kebijakan (Soetopo, 2005:10). Senada dengan Anggara hyang menyatakan, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya adalah tindakan pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat baik dilakukan maupun tidak dilakukan (Anggara, 2014).

Walaupun perbedaan pendapat mengenai kebijakan, namun pada intinya para ahli kebijakan memiliki pengertian yang sama, yaitu bentuk tindakan dari pemerintah adalah kebijakan publik yang meberikan arah dan pedoman yang berkenaan dengan proses proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam prosesnya, kebijakan publik bersifat komprehensif, yaitu segala hal bisa saja mempengaruhi atau dipengaruhinya bagi masyarakat yang melaksanakan atau tidak melaksanakan. Adapun tahap – tahap kebijakan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3

Tahap – tahap Kebijakan

Sumber: William Dunn (2003: 32-34)

William Dunn (2003: 32-34) menegaskan, dalam membuat kebijakan publik terdapat proses dan variabel, antara lain:

(1) Tahap penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan.

(2) Tahap formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan- pilihan kebijakan oleh pemerintah. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

(3) Tahap adopsi kebijakan yakni, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas

(4) Tahap implementasi kebijakan (*policy implementation*) yaitu proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam tahap ini persaingan alan saling bersaing dan menempati kedudukannya dari berbagai kepentingan. Mayoritas akan mendapatkan dukungan dari para pelaksana (*implementors*),

namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

(5) Tahap evaluasi kebijakan. (*policy evaluation*), yaitu proses memonitor dan menilai hasil penerapan kebijakan di lingkungan masyarakat untuk meninjau dampak maupun tujuan yang sesuai atau belum dari penerapan kebijakan tersebut

Tujuan dari kebijakan publik adalah menyerap, mengatur, membebaskan sumber daya untuk memperkuat negara dan pasar (*William N. Dunn / Pengantar Analisis Kebijakan Publik | Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara*, t.t.).

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah sebuah proses untuk mewujudkan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan guna mewujudkan perencanaan yang selesai dikerjakan dengan menggerakkan semua sumberdaya yang dimiliki organisasi melalui aktivitas koordinasi dan supervisi. Gambaran mengenai implementasi program BKR dapat dilakukan dengan menggunakan teori pendekatan sistem IPO (Process, Output and Outcome). Metode ini digunakan sebagai model evaluasi dengan melakukan pendekatan sistem. Menurut Ismagil (1982) Pendekatan sistem adalah suatu pendekatan analisis organisasi yang menggunakan unsur-unsur sistem sebagai titik tolak analisis (Maniah dan Hamidin 2017 : 1).

Komponen suatu sistem terdiri dari masukan (input), proses (process), keluaran (output) dan dampak (outcome) serta mekanisme umpan baliknya (feedback). Berikut penjelasan mengenai komponen pendekatan sistem :

a. Input

Input yaitu kumpulan elemen yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk sistem tersebut (Azwar, 2010: 28). Input merupakan sumber daya yang dimiliki oleh institusi kesehatan (Munijaya, 2014: 46). Unsur masukan dari suatu sistem dalam penelitian ini yaitu:

1) Man (Tenaga/Sumberdaya manusia)

Sumberdaya manusia adalah segenap potensi yang dimiliki manusia. Manusia adalah orang yang menggerakkan dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk juga mendayagunakan sumberdaya lainnya. Dalam penelitian ini tenaga dipengaruhi oleh pelatihan dan pengembangan yang didapatkan serta karakteristik sasaran dan atau pelaksana.

2) Money (Dana)

Dana merupakan salah satu unsur yang penting dalam implementasi program. Uang merupakan alat tukar dan alat pen gukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat

diukur dari jumlah uang yang beredar dalam institusi, perusahaan maupun lembaga untuk mencapai tujuan organisasi. Dana dari suatu program biasanya didapat dari dana APBN, APBD maupun swadaya masyarakat. Menurut Tampunbolon (2009) Ketersediaan dana yang cukup adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program karena pengalokasian dana tersebut sesuai dengan yang diprogramkan (Farkhanani, 2016:28).

3) Materials (Sarana)

Materi terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Sarana yang lengkap akan mendukung keberhasilan program dan kelancaran kegiatan yang diprogramkan. BKKBN (2013: 31) menyebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program BKR adalah papan nama, buku pedoman, buku registrasi, buku kegiatan kelompok, media penyuluhan dan media BKR.

4) Methode (Metode)

Pelaksanaan dalam kerja yang diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat

> dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Pelaksanaan program jika tidak ada metode sebagai acuan maka dalam pelaksanaan program besar kemungkinan terjadi salah persepsi, sehingga metode dalam suatu program sangat penting keberadaanya (Farkhanani, 2016: 29-30).

b. Process

Proses (process) merupakan kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Unsur dari proses antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian. Perencanaan merupakan memilih kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang tersedia yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Pengorganiasian merupakan pengkoordinasian secara rasional berbagai kegiatan dari sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama, dengan jalan pembagian kerja dan fungsi secara berjenjang secara bertanggung jawab. Pelaksanaan merupakan langkah untuk mewujudkan rencana dengan mempergunakan organisasi yang terbentuk menjadi kenyataan. Penilaian merupakan proses yang menentukan keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat diketahui efektivitas program tersebut dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program.

c. Output

Keluaran (output) adalah kumpulan bagian yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem. Keluaran yang dimaksud merupakan pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, output program BKR adalah adanya peningkatan pengetahuan pada anggota dalam memahami substansi BKR serta adanya perubahan sikap terhadap fenomena pernikahan dini sebagai suatu kelompok yang kontra.

4. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Model menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (2004), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persayaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah :

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala/hambatan(constraints) pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali paraa dministrator, Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis.
b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadahi. Kebijakan yang memilki tingkat kelayakan fisik

dan politis tertentu bisasaja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendalanwaktu yang pendek dengan harapan yang terlalu tinggi

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadahi. Dalam prakteknya implementasi program yang memerlukan perpaduanantara dana, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan programharus dapat disiapkan secara serentak, namun ternyata ada salah satu komponentersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat programtersebut tertunda pelaksanaannya.
d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadang kala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukanlantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendirimemang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahamanyang tidak memadahi mengenahi persoalan yang akan ditanggulangi, sebab-sebabtimbulnya masalah dan cara pemecahanya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untukmemanfaatkan peluang-peluang tersebut.
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa bebarapa diantaranya

kelakterbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan hubungantertentu, melainkan juga kesepakatan atau komitmen terhadap setiap tahapan diantarasejumlah aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapatdikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Kemungkinan menimbulkan konflik yang tajam atau kebingungan, khususnya oleh kelompok profesional atau kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam program lebih mementingkan tujuan mereka sendiri.

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yangsempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Untuk mengendalikan programdengan baik dapat dilakukan dengan teknologi seperti Network planning dan contrrol.

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Pada kebanyakan organiasi yangmemiliki ciri-ciri departemenisasi, profesionalisasi, dan bermacam kegiatan kelompok yang melindungi nilai-nilai dan kepentingan kelompok hampir tidak adakoordinasi yang sempurna. Komunikasi dan koordiasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, syaran dan perintah-perintah dapatdimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki.

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistimadministrasinya. Persyaratan ini menandaskan bahwa mereka yang memilikiwewenang, harus juga yang memiliki kekuasan dan mampu menjamin adanyakepatuhan sikap secara menyeluruh dari pihak-pihak lain baik dalam organisasimaupun luar organisasi. Dalam kenyataan dimungkinkan adanya kompartemenisasidan diantara badan yang satu dengan yang lain mungkin terdapat konflik kepentingan

5. Organisasi

Dalam setiap organisasi memerlukan teori organisasi sebagai alat *(tool)* atau wahana dan manajemen dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya yang didalam ilmu administrasi lebih menekankan pada kedudukan organisasi yang berhubungan dengan administrasi. Organisasi di bentuk sebagai upaya mencapai tujuan sekalipun organisasi tersebut dalam skala kecil. Begitu juga dengan organisasi negara yang dibentuk pada dasarnya untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan tujuan organisasi dan peraturan perundangan yang telah ditetapkan yakni pelayanan publik (Anggara, 2016). Pelaksanaan organisasi harus berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi untuk menciptakan organisasi yang berhasil dan tepat pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah penjelasan singkat:

1) Prinsip perumusan tujuan.

Perumusan tujuan yang dimaksud haruslah dibuat dengan jelas sebab organisasi atau lembaga memiliki tujuan yang harus dilakukan oleh organisasi dengan menentukan hal yang diperbuat pada organisasi itu sendiri.

2) Prinsip pembagian kerja.

Pembagian tugas kerja dilakukan untuk menata kegiatan organisasi untuk menghindari terjadinya kesalahan atau pekerjaan yang tidak merata dalam sebuah organisasi

3) Prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya suatu unit hars diberi kekuasaan dan harus melakukan pertanggungjawaban agar tugasnya dapat berjalan dengan baik dan benar

4) Prinsip tingkat pengawasan.

Sistem pengawasan perlu dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Tingkat pengawasan ini melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

5) Prinsip rentang manajemen.

Pada prinsip ini rentang manajeman yang dimaksud adalah bagaimana seorang atasan yang membawahi beberapa karyawan dengan melihat pengawasan secara efektif dan efisien secara optimal.

6) Prinsip kesatuan perintah.

Kesatuan perintah dari atasan bahwa pada suatu organisasi seorang bawahan harus memberikan laporan pertanggung jawaban dari apa yang telah dikerjakan.

7) Prinsip koordinasi.

Prinsip ini diperlukan untuk menghindari konflik pada antar anggota serta meperkuat kerja sama atar anggota organisasi.

6. Pemberdayaan

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan,

kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik. (Anwas, Oos M, 2013, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung : Alfa Beta.)

Menurut Sumaryadi (2005:97-98) menggambarkan konsep pemberdayaan dalam tiga tahapan nya itu tahapan politis, organisasi, dan individu. Adapun tiga tahapan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Politis dan Nasionalis

Pemberdayaan secara perlahan melekat dalam bahasa kita setiap hari sebagai mechanism of self-help for people (mekanisme bantuan dari dan bagi orang lain). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa justru orang yang ingin mengubah sesuatu mengenai keadaan mereka saat ini adalah diri mereka sendiri. Ketergantungan pada orang lain secara perlahan-lahan diganti oleh ketergantungan pada diri sendiri. Oleh karena itu, pada tingkat nasional self-dependency movement (gerakan 38 Ibid,hal150 32 pada kemampuan diri sendiri) terus mendapat tempat. Alasan lain dan lebih pragmatis adalah bahwa ilmu ekonomi dari dorongan terhadap efisiensi yang lebih besar mendorong pemerintah. Organisasi dari masyarakat untuk mencari cara-cara alternatif untuk menjadi lebih efisien, yang merupakan

tanggapan terhadap meningkatkan daya dan ancaman pelayanan alternatif dari para pesaing.

b. Organisasi

Pemberdayaan mempunyai daya tarik. Selalu ada pencarian akan gagasan-gagasan dan konsep baru dari pemberdayaan lebih baru, lebih segar dari pada banyak teori peningkatan dan motivasi kerja yang sudah usang. "Organisasi seperti total quality, habitual improvement, selfsirected team work, internal costumer, competence management dan sebagainya. Banyak prilaku faktor pemberdayaan dan ketidakberdayaan terkandung dalam nilai-nilai, prilaku, sistem, prosedur dan budaya organisasi perubahan-perubahan harus dilakukan pada tingkat yang berada diluar pengaruh individu. Mereka tidak mungkin terjadi tanpa perencanaan dan pelepasan yang menyeluruh dari kekuatan oleh manager senior organisasi.

c. Individu

Proses pemberdayaan berbeda untuk setiap individu. Ada yang lama, ada juga yang disingkat prosesnya. Bila pemberdayaan efektif, hasilnya sangat inspirasional, individu sudah mengubah kehidupan mereka 33 mencapai tujuan dan target yang terjangkau yang mereka anggap tidak mungkin. Mereka sudah membuka jalan bagi perkembangan dan pertumbuhan yang menguntungkan mereka maupun organisasi bila tim individu yang di berdayakan secara kolektif berkerja sama maka sinergi tercapai.

7. BKR

Menurut BKKBN (2012: 7) Kelompok Bina Keluarga Remaja adalah suatu wadahkegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai anak usia remaja 10-24 tahun yangbertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua dalam mendidik anak remaja yang benar,dimana orang tua mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkandan membina tumbuh kembang anak remaja.

Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dalam pasal 48 ayat 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa Kelompok Bina Keluarga Remaja merupakan salah satu upaya dalam menciptakan ketahanan keluarga dan mewujudkanpeningkatan kualitas remaja. Dimana Bina Keluarga Remaja dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, dan anggota yang dibimbing dan dibantu olehpembina/penyuluh.Bina Keluarga Remaja adalah suatu program untuk memfasilitasi remaja dalam berperilaku sehat, terhindar dari Triad KRR (seks bebas, napza, HIV/AIDS), menundausia pernikahan sampai kematangan lahir batin pada remaja untuk mewujudkan Tegar remaja.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kelompok Bina Keluarga Remajamerupakan sebuah program dari pemerintah dalam rangka pembinaan, dimana Bina Keluarga Remaja merupakan suatu

upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilanorang tua dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melaluikomunikasi efektif antara orang tua dan anakremaja.

Menurut BKKBN (2012) Kelompok Bina Keluarga Remaja berperan dalam memberdayakan masyarakat khususnya remaja melalui penyuluhan, bimbingan dan pembinaankepada orangtua tentang cara mengasuh, dan membina anak remajanya dengan baik dan benar melalui komunikasi yang efektif antara orang tua dan remaja. Adapun Peran Kelompok Bina Keluarga Remaja :

1) Pembinaan

Pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari yang diharapkan akan menjadi kebiasaan yang baik. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

2) Bimbingan

Bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu-individu gunamembantu mereka memperoleh pengetahuan-pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilanm yang

diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan keputusan. Layanan bimbingan yang diberikan pada individu atau sekumpulan individu berguna untuk menghindari dan mengatasi masalah dalam kehidupannya secara mandiri.

3) Penyuluhan

Penyuluhan adalah bentuk usaha pendidikan non-formal kepada individu ataukelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematik, terencana dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatandan perbaikan kesejahteraan. Penyuluhan merupakan upaya perubahan perilaku manusiayang dilakukan melalui pendekatan edukatif, pendekatan edukatif diartikan sebagairangkainna kegiatan yang dilakukan secara sistematik, terencana, dan terarah dengan peranserta aktif individu, kelompok, atau masyarakat untuk memecahkan masalah denganmemperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

BKR Amanah Desa Curah Dringu

Bina Keluarga Remaja merupakan program pemerintah (BKKBN) yang ditujukan untuk orang tua yang memiliki anak remaja dengan harapan program tersebut mampu membantu orang tua mendapatkan informasi terkait pembinaan terhadap anak remajanya.

Program BKR ini sudah terdapat di Desa Curah Dringu sejak tahun 2019 hingga saat ini. Program sudah berjalan dengan baik walaupun belum sangat optimal dalam memberikan pelayanannya dikarenakan masih banyak keterbatasan. Tetapi peneliti melihat bahwa program BKR Desa Curah Dringu memiliki potensi dalam penanganan atau pencegahan masalah remaja seperti pernikahan dini.

BKR amanah Desa Curah Dringu ini memiliki visi dan misi untuk ketercapaian program, sebagai berikut :

A. Visi

Terwujudnya generasi berencana yang bahagia dan sejahtera.

B. Misi

Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang perannya dalam mengasuh anak remaja, menumbuhkan rasa cinta dan kasih saying timbal balik antara orang tua dengan anak, serta menciptakan hubungan serasi dan harmonis yang didukung oleh sikap perilaku yang rasional dan bertanggung jawab.

(BKR Desa Curah Dringu 2022)

C. SK Program BKR Amanah

Gambar 2.4

KEPALA DESA CURAH DRINGU
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CURAH DRINGU
NOMOR : 188/ /426.423.05/2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM BINA KADER REMAJA (BKR) "AMANAH"
DESA CURAH DRINGU

TAHUN 2022

KEPALA DESA CURAH DRINGU,

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan desa yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Curah Dringu tentang Penunjukan Tim Bina Kader Remaja (BKR) Desa Curah Dringu Tahun 2022.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Probolinggo;
9. Peraturan Desa Curah Dringu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Menunjuk Tim Bina Kader Remaja (BKR) "Amanah" Desa Curah Dringu Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua), dan 3 (tiga) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini terdiri dari :

a. Bina Kader Remaja (BKR) adalah tenaga kesehatan di desa untuk mendata, mengantisipasi, memonitoring segala permasalahan pada bidang kesehatan remaja di masyarakat Desa Curah Dringu;
b. Melaporkan kegiatan kepada Bidan dan Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curah Dringu Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curah Dringu
Pada tanggal 23 Mei 2022

KEPALA DESA CURAH DRINGU

TIYAYAH

TEMBUSAN :
Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo;
2. Camat Tongas Kabupaten Probolinggo.

Sumber :(BKR Curah Dringu 2022)

Tabel 2.2

Susunan pengurus BKR "Amanah" Desa Curah Dringu

No.	Nama	Jabatan
1	ERNI LATIFAH	Ketua
2	AYU IMAMAH	Sekretaris
3	DEWI ROHLAH	Bendahara
4	INAWATI	Anggota
5	MASLIKAH	Anggota
6	SITI SAUDAH	Anggota

Sumber :(BKR Curah Dringu 2022)

B. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

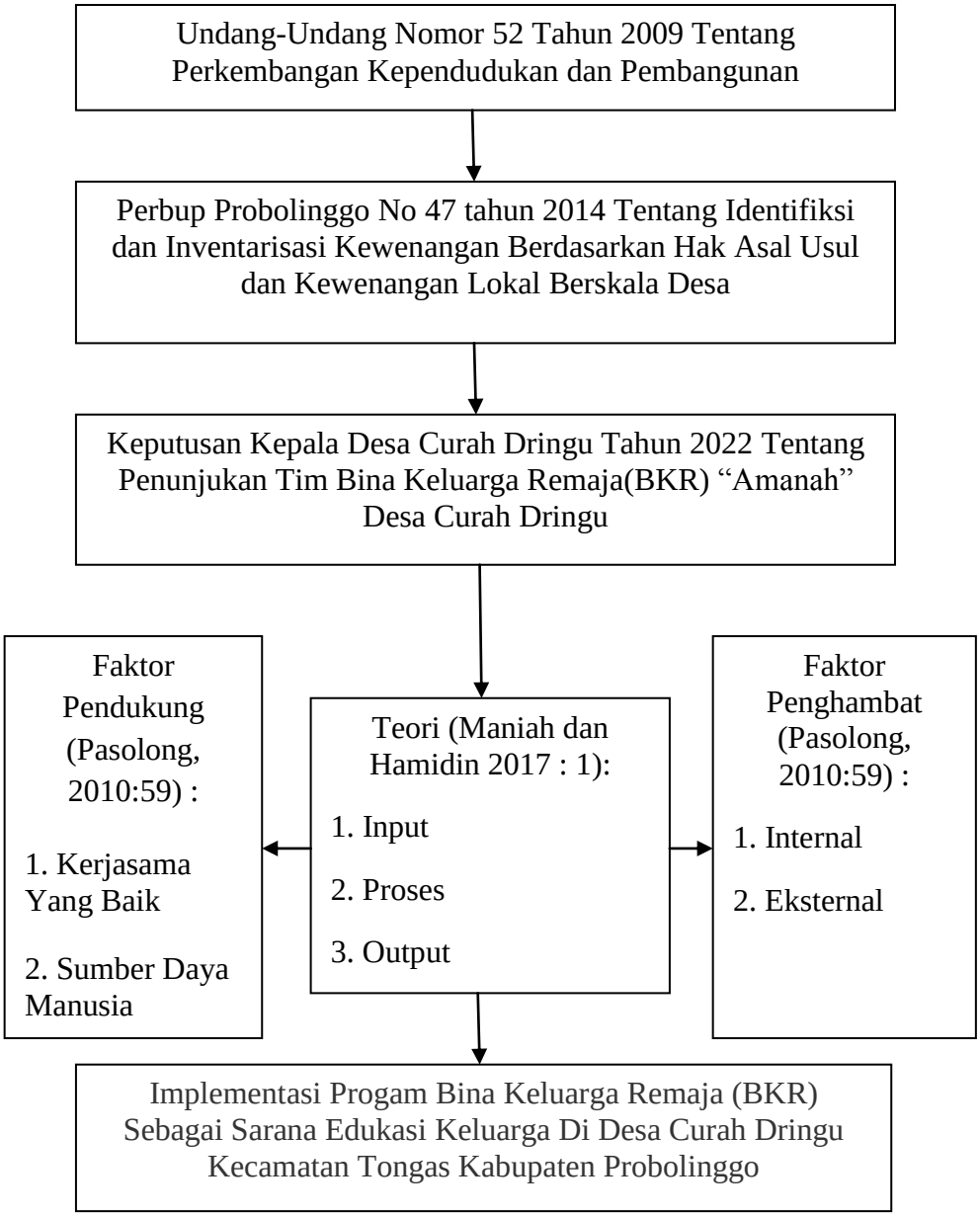

Sumber : Maya Sofiana, 2022